

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, H., A. 2014. *Hukum Pidana I*. Edisi ke 4. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amalia, M., Rays, H. I., Hosnah, A., dan Fajrina, R. M. 2024. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi ke 1. PT. Sonpedia Publishing. Indonesia.
- Asshiddiqie, J. 2021. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi ke 2. Sinar Grafika. Jakarta.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi ke 1. Scopindo. Surabaya.
- Erdianti, R. N. 2019. *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*. Edisi ke 1. UMMPress. Malang.
- Eddy Hiariej, dan Topo Santoso. 2025. *Anotasi KUHP Nasional*. Edisi ke 1. Rajawali Pers. Depok.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Edisi ke 1. Mitra Buana Media. Yogyakarta.
- Kristanti, D., Kardini, N. L., dkk. 2023. *Etika bisnis*. Edisi ke 1. Global Eksekutif Teknologi. Padang.
- Muladi, S. H., Diah Sulistyani, R. S., & SH, C. 2021. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Edisi ke 1. Penerbit Alumni. Bandung.
- Nugrahanti, Y. W., Rita, M. R., Restuti, M. M. D., & Hadiluwarsa, M. A. 2024. *Perilaku Keuangan Mahasiswa dalam Penggunaan Paylater: Beli Sekarang-Bayar Nanti*. Edisi ke 1. Penerbit NEM. Jawa Tengah.
- Rahardjo, S. 2021. *Ilmu Hukum*. Edisi ke 9, PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Reumi, F., Judijanto, L., Rahmawati, R., Setiyono, S., Thahir, T., Badilla, N. W. Y., & Purwaningsih, R. 2026. *Hukum Pidana Indonesia*. Edisi ke 1. PT. Sonpedia Publishing.
- Rizal F. 2022. *Sanksi Reparatif Pada Pemidanaan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Edisi ke 1. Litera. Yogyakarta.
- Topo Santoso. 2023. *Asas-asas hukum pidana: dilengkapi uraian KUHP nasional*. Edisi ke 1. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Supramono, G. 2020. *Hukum Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Edisi ke 1. Kencana. Jakarta.
- Taufik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Edisi ke 1. PT. Sangir Multi Usaha. Jakarta.

Skripsi

- Awani, Q. 2023. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna fitur *Pay Later* pada aplikasi jual beli online. *Skripsi*. Universitas Semarang.
- Dino, F. 2022. Tanggung jawab penyelenggara *Pay Later* terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna *Pay Later*. *Skripsi*. Universitas Andalas.

Jurnal

- Achmad, F., Suhandi, D., Tumangger, M. T. D., Amaliyah, A., & Imron, A. 2025. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Online: Kajian Kritis atas Klausula Baku dan Asas Itikad Baik. *Rio Law Jurnal*.
- Alfianda, R., Risardi, M., Kamisan, Amin, M., Sarioda, Maulida, R., dan Albayani, A. Z. 2024. Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*.
- Angelia, R. R. O., Erwin, R., dan Desmon, A. 2024. Sanksi terhadap Korporasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Akibat Kebocoran dan Penyalahgunaan Data Pribadi. *Ensiklopedia of Journal*.
- Anjari, W. 2018. Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Widya Yustisia*.
- Ansa, C. B. 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Administratum*.
- Aulia, E. S., Agustian, S. L., dan Sugianto, F. 2025. Perlindungan Konsumen Terhadap Penyebaran Informasi Menyesatkan yang Disampaikan Melalui Iklan. *Progressive Law Review*.
- Buamona, S. 2019. *White collar crime* (kejahatan kerah putih) dalam Penegakan Hukum Pidana. *Madani Legal Review*.
- Dita, S. A., dan Winanti, A. 2023. Analisis Asas *Vicarious Liability* dalam Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank. *Jurnal USM Law Review*.
- Efendi, S. 2023. Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*.
- Eric, E., dan Anggraita, W. 2021. Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*.

- Erikha, A., dan Hoesein, Z. A. 2025. Strategi Pencegahan Kebocoran Data Pribadi Melalui Peran Kominfo dan Gerakan Siberkreasi dalam Edukasi Digital. *Jurnal Retentum*.
- Fadhli, Z., Rahayu, S. W., dan Gani, I. A. 2022. Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Transaksi *Pay later*. *Jurnal Hukum Magnum Opus*.
- Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J., dan Hosnah, A. U. 2024. Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*.
- Febriansyah, F. I., dan Purwinarto, H. S. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Hakim, L. 2019. Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). *Krtha Bhayangkara*.
- Isa, S. N., Saragih, Y. M., Purba, P., Manurung, K., dan Manurung, H. 2025. Tanggung Jawab Pidana Direksi dan Korporasi dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak. *Journal of Law Review*.
- Juwita, K. 2025. Kesenjangan Regulasi dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penyelenggaraan Layanan *Buy Now Pay Later* di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- Kila, F., Sugiarta, I. N. G., dan Ujianti, N. M. P. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*.
- Kristian. 2019. Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana bagi Lembaga Perbankan Ditinjau dari Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*.
- Kurniawan, I. 2023. Kriteria Untuk Menentukan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dari Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *UNES Law Review*.
- Kurniawan, K. D., dan Hapsari, D. R. I. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menurut *Vicarious Liability Theory*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Mahanani, A. E. E., Aditiawan, F. P. dan Anggriawan, T. P. 2020. Penguatan *legal awereness* di masyarakat terhadap undang-undang perlindungan konsumen melalui pemanfaatan teknologi informasi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*.
- Mahendra, M. I. R., dan Neltje, J. 2023. Perlindungan Hukum Preventif dan

Represif terhadap Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu atau Musik.
Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial.

Mahyudin, N. 2023. Pertanggung Jawaban Pidana Masing-Masing Peserta dalam Pembunuhan Berencana karena Perintah Jabatan. *Lex Privatum*.

Maramis, J. S. R. A., & Bawole, H. Y. 2025. Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Aplikasi Shopee dengan Sistem Pembayaran *Pay later*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*.

Ningrum, H. W. 2018. Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*.

Novendra, B., & Aulianisa, S. S. 2020. Konsep dan Perbandingan *Buy Now, Pay Later* dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di Era Digital dan Teknologi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. 2021. Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*.

Panjaitan, R. M. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Terjadinya Kebocoran Data Pengguna Sistem Elektronik. *Jurnal Hukum Adigama*.

Profianto, M. I. 2025. Merekonstruksi Kesalahan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Pidana di Bidang Perpajakan. *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*.

Ratomi, A. 2018. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana dalam Menghadapi Arus Globalisasi dan Industri). *Al-Adl: Jurnal Hukum*.

Sachruddin, S., Kadir, Y., & Bunga, M. 2025. Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*.

Salsabila, S., & Wiraguna, S. A. 2025. Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*.

Sari, N., dan Prianto, W. 2024. Analisis Yuridis Putusan Nomor 496/PID. SUS/2022/PN. KDI terhadap Pasal 51 Ayat (1) KUH Pidana dan Teori *Vicarious Liability*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*.

Satura, G. A., Gulo, E. B. F., dan Ismara, Y. B. C. 2024. Perlindungan konsumen: Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Ilmu Hukum*:

ALETHEA.

- Siagian, E., Syahrin, A., Siregar, M., dan Ekaputra, M. 2023. Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas dalam Kegiatan Bisnisnya. *Locus Journal of Academic Literature Review*.
- Sinaulan, J. H. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*.
- Suhami, 2018, Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*.
- Suharini, S., dan Hastasari, R. 2020. Peran otoritas jasa keuangan terhadap fintech ilegal di indonesia sebagai upaya perlindungan pada konsumen. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*.
- Surya, P. R., Pratiwi, I., Utari, D., Prima, A. B., dan Amerta, M. R. 2024. Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Pertanggung-Jawabannya dalam Hukum Pidana Indonesia. *Puan Indonesia*.
- Syahrir, K. A., Karim, M. S., & Mirzana, H. A. 2022. Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Tumou Tou Law Review*.
- Wahyuni, R. 2022. Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Warga Terdampak Penggusuran di Kawasan Perkotaan Berdasarkan Perspektif HAM. *Jurnal Yuridis*.
- Weno, A. W., Muaja, H. S. M., dan Dapu, F. M. 2025. Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Ahli Hukum Pada Perusahaan dan Kaitannya dengan Pembatasan Aksi Korporasi. *Lex Administratum*.
- Yusni, M., & Sigalingging, B. 2024. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Rangka untuk Deterrence Effect dan Effective Deterrence. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*.

Sumber Internet

- Hukum online. 2025. *Pentingnya Kesadaran Perlindungan Data Pribadi bagi Korporasi*. URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-kesadaran-perlindungan-data-pribadi-bagi-korporasi-lt68e0888c2b809/>. Di akses tanggal 26 Desember 2025.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2021. *Vicarious Liability*. URL: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1895-vicarious-liability>. Di akses tanggal 27 Desember 2025.

- Khadafi, M. 2024. *Warga RI Makin Doyan Ngutang di Paylater, Pinjaman Tembus Rp 6 Triliun*. URL: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240514153331-17-538006/warga-ri-makin-doyan-ngutang-di-paylater-pinjaman-tembus-rp-6-triliun>. Di akses tanggal 18 Desember 2025.
- Kurnia, E. 2022. *Polda Metro Jaya Tangkap Penyebar Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online di Manado*. URL: <https://www.kompas.id/artikel/polda-metro-jaya-tangkap-penyebar-data-pribadi-nasabah-pinjaman-daring-di-manado>. Di akses tanggal 11 Februari 2026.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2025. *Press Release for the Monthly Board of Commissioners Meeting of February 2025: Financial Services Sector Stability Remains Secure amid Increasing Economic Dynamics*. URL: <https://ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Financial-Services-Sector-Stability-Remains-Secure-Amid-Increasing-Economic-Dynamics-RDKB-Feb-2025.aspx>. Di akses tanggal 3 Januari 2026.
- Pime Asia News. 2025. *Govt Imposes New Rules for "Buy Now, Pay Later" as Debt Rises Among Young People*. URL: <https://www.asianews.it/news-en/Govt-imposes-new-rules-for-'buy-now.-pay-later%E2%80%99-as-debt-rises-among-young-people-62452.html>. Di akses tanggal 3 Januari 2026.
- Quiserto, R. 2019. *Paylater - OVO, Gojek, Traveloka - Mana Terbaik Terpercaya*. URL: <https://duwitmu.com/pinjaman-online/paylater-ovo-gojek-traveloka-terbaik>. Di akses tanggal 1 Januari 2026.
- Siregar, P.D. 2024. *Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia*. URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8/>. Di akses tanggal 26 Desember 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pemerintah Indonesia. 1999. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 22. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2013. *Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara RI Tahun 2013, No. 232. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Pemerintah Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*. Lembaran Negara RI Tahun 2016, No. 1829. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara RI Tahun 2019, No. 185. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2022. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. Lembaran Negara RI Tahun 2022, No. 2. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara RI Tahun 2022, No. 196. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2023. *Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara RI Tahun 2023, No. 1. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2024. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara RI Tahun 2024, No. 1. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2025. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later)*. Lembaran Negara RI Tahun 2025, No. 44. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.